

Original Research Paper

## Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Dusun Ujung Desa Pemongkong Kabupaten Lombok Timur

Syarif Husni<sup>1\*</sup>, M.Yusuf<sup>1</sup>, Muhammad Nursan<sup>1</sup>, Aeko Fria Utama FR<sup>1</sup>, Ni Made Zeamita Widiyanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

<https://doi.org/10.29303/jpmipi.v5i4.2503>

Sitasi : Husni, S., Yusuf, M., Nursan, M., Utama FR, A. F., & Widiyanti, N. M. Z., (2022). Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Dusun Ujung Desa Pemongkong Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(4)

### Article history

Received: 20 Oktober 2022

Revised: 30 November 2022

Accepted: 8 Desember 2022

\*Corresponding Author: Syarif Husni, Program Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram;  
Email: [syarifhusni1964@gmail.com](mailto:syarifhusni1964@gmail.com)

**Abstract:** Tujuan pengabdian: a) Mengidentifikasi isu dan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut dan b) Menyusun rencana strategis pengelolaan sumberdaya pesisir di Dusun Ujung Desa Pemongkong. Metode pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan sumberdaya yaitu Metode Focus Group Discussion (FGD). Hasil pengabdian: 1) Identifikasi isu (a) kondisi lingkungan : sanitasi/kebersihan, abrasi pantai, air bersih, (b) rencana pembangunan di wilayah perencanaan: konflik daerah tangkapan, konflik pembudidaya ikan dengan nelayan, (c) kesejahteraan sosial ekonomi: pendidikan rendah, pemasaran hasil perikanan, kelembagaan masyarakat, pertumbuhan penduduk, produksi perikanan, (d) pemanfaatan sumberdaya perikanan: Kerusakan terumbu karang, produksi rumput laut yang rendah, 2) telah tersusunnya dokumen rencana strategis pengelolaan sumberdaya pesisir di Dusun ujung Desa Pemongkong.

**Keywords:** Rencana strategis, pengelolaan, sumberdaya pesisir,

## Pendahuluan

Fakta menunjukkan bahwa sekitar 60% rakyat Indonesia hidup dan menggantungkan hidupnya di wilayah pesisir. Oleh karenanya apabila kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang ada ingin tetap dipertahankan, maka diperlukan komitmen dari semua pihak (*stakeholders*) untuk menjaga dan mengelola kualitas dan daya dukung lingkungan wilayah yang unik tersebut (Tulungen, *et.al*, 2003).

Salah satu upaya penting yang menjadi kunci keberhasilannya adalah keterlibatan masyarakat, mengingat upaya menjaga dan mengelola tersebut hanya dapat dicapai jika masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*)

lainnya memiliki informasi, pemahaman dan visi yang sama dalam mengelola sumberdaya. Pembinaan dan pengembangan masyarakat pesisir bisa berhasil dengan baik hanya jika *stakeholders* utamanya masyarakat pesisir berpartisipasi secara aktif (Dahuri, *et al.*, 1987).

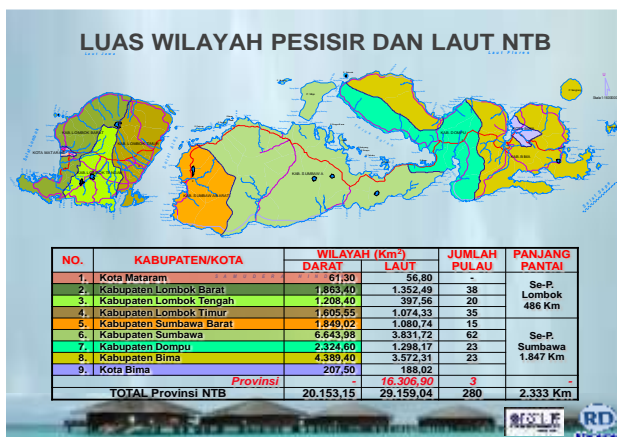
Pengelolaan berbasis masyarakat sudah merupakan suatu pendekatan yang banyak dipakai dalam program-program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di berbagai Negara di dunia, khususnya Negara-negara berkembang. Pendekatan ini secara luas di wilayah Asia Pasifik seperti Negara Filipina dan Pasifik Selatan.

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat adalah sebuah strategi yang komprehensif yang dilakukan untuk menangani isu-isu yang mempengaruhi lingkungan pesisir melalui partisipasi aktif dan nyata dari masyarakat pesisir.

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat juga merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat pesisir secara politik dan secara ekonomi sehingga mereka dapat mempertegas haknya dan memperoleh akses yang benar dan kontrol dalam pengelolaan atas sumberdaya pesisir mereka (Tulungen, *et.al*, 2003).

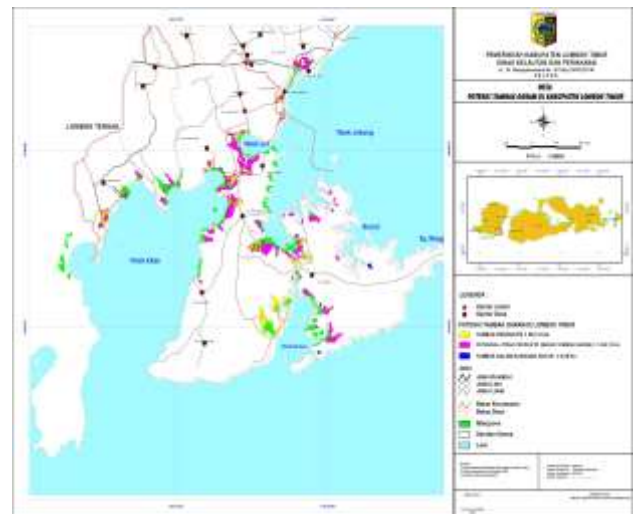
Pendekatan dalam pengelolaan pesisir berbasis masyarakat ini belum banyak dipraktikkan di Indonesia, pada hal dua per tiga wilayah Indonesia adalah laut, termasuk di Propinsi NTB khususnya Kabupaten Lombok Timur. Pengelolaan sumberdaya pesisir selama ini hanya ditangani secara temporal dan bersifat sektoral, dan tidak melibatkan masyarakat sehingga penanganannya tidak berkelanjutan dan tidak terpadu. Oleh karena itu perlu ada perencanaan yang matang dalam pengelolaan sumberdaya dengan melibatkan masyarakat dan stakeholders lainnya.

Kawasan pesisir Teluk Ekas terletak diantara Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Teluk tersebut dikelilingi oleh 6 desa dari 2 kecamatan. Desa Mertak dan Desa Bile Lando (Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah), Desa Batunampar Selatan, Desa Sukaraja, Desa Jerowaru, dan Desa Pemongkong (Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur) dengan luas 5.643,69 ha. Lokasi teluk terlindung dari arus dan gelombang besar, karena adanya daerah karang di mulut teluk yang dapat berfungsi sebagai pemecah gelombang.



Gambar 1. Zonasi Pengembangan Kawasan Pesisir di NTB

Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru sebagai salah satu desa yang terletak di pesisir bagian barat Teluk Ekas, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan yaitu sebagai



Gambar 2. Peta Kawasan Teluk Ekas

Aksesibilitas menuju desa Pemongkong sangat lancar dengan jarak dengan ibukota propinsi adalah 60 km, jarak dengan ibukota kabupaten 30 km dan jarak dengan ibukota kecamatan adalah 15 km. Sarana penerangan listrik sudah masuk ke lokasi namun sarana air bersih masih sulit. Aktivitas penangkapan hanya terbatas di sekitar perairan teluk, karena menggunakan sampan ukuran kecil dengan penggerak motor tempel. Alat tangkap yang digunakan adalah berbagai jenis

jaring dan bubu yang masih sederhana terutama untuk menangkap rajungan (Husni, S., et al, 2021)

Untuk mencapai kesinambungan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir tersebut penggalian isu dan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir secara komprehensif yang melibatkan seluruh masyarakat di desa ini menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

Penggalian atau indentifikasi merupakan proses pengumpulan informasi dan penentuan masalah-masalah sumberdaya pesisir yang ada di desa, sebab akibat dari permasalahan dan penanganan isu yang direkomendasikan atau diusulkan dalam perencanaan pengelolaan. Adapun tujuan atau maksud yang ingin dicapai dengan adanya pengidentifikasian isu oleh masyarakat dan pemerintahan desa antara lain mengetahui permasalahan kunci, memberikan rasa “memiliki” program yang baik, dan tersedianya informasi penting mengenai sumberdaya alam dan penggunaannya bagi perencana (Tulungen, et al., 2003).

Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat adalah 1) Mengidentifikasi isu dan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut di Dusun Ujung Desa Pemongkong dan Menyusun Rencana strategi pengelolaan sumberdaya pesisir pesisir di Dusun Ujung Desa Pemongkong

## Metode

Metode pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan sumberdaya Pesisir ini terdiri Metode Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD). Metode Sosialisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program. Meskipun terlihat sepele dan ringan, namun proses sosialisasi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program. Sehingga seorang fasilitator harus sangat berhati-hati dalam proses sosialisasi, mengingat kondisi masyarakat yang sangat heterogen, baik tingkat pendidikan, karakter, daya terima dan pemahaman masyarakat. Dalam proses sosialisasi seorang fasilitator setidaknya melakukan sosialisasi terkait personal dirinya, seperti nama, asal, maksud dan tujuan datang ke wilayah tersebut, kemudian melakukan sosialisasi program seperti nama program, tujuan program, konsep program,

jangka waktu pelaksanaan, sasaran dan target program (Hidayat, M., Surochiem, 2008).

Selanjutnya Metode *Focus Group Discussion* (FGD). Diskusi Kelompok Terarah merupakan suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik (Irwanto, 2007). Diskusi kelompok terarah adalah wawancara dari sekelompok kecil orang yang dipimpin seorang narasumber atau moderator yang mendorong peserta untuk berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan topik saat itu.

Tujuan dari Diskusi Kelompok Terarah itu sendiri adalah untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik. Penyelesaian masalah ini ditentukan oleh pihak lain setelah informasi berhasil dikumpulkan dan dianalisis. FGD dilakukan bersama dengan informan kunci yaitu Kepala desa dan perangkatnya ketua RT, kepala Dusun, Perwakilan kelompok nelayan, perwakilan pemuda, perwakilan perempuan, tokoh Agama dan Tokoh masyarakat. Pada tahap I adalah penggalian isu atau perkembangan dan kondisi isu beserta lokasi dan penyebarannya, penyebab (oleh aktivitas manusia atau alamiah, akibat yang ditimbulkan (dampak ekologis, ekonomis atau kondisi sosial masyarakat), dan penanganan yang mungkin sudah dilakukan atau akan dilakukan serta keterkaitan isu tersebut dengan isu lain. Kemudian melakukan rapat pleno yang membahas pandangan umum dan kesepakatan tentang Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir di Dusun Ujung Desa Pemongkong.

## Hasil dan Pembahasan

### Identifikasi isu dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Laut

Kegiatan penyusunan Rencana Strategi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dilaksanakan di Balai Pertemuan Nelayan Dusun Ujung pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2022. Peserta yang hadir berjumlah 31 orang (daftar hadir peserta terlampir) terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kaum perempuan, dan ketua-ketua RT, dan kepala Dusun Ujung

Acara pertemuan dibuka langsung oleh Kepala Dusun Ujung dan kemudian dilanjutkan diskusi dengan peserta melalui Teknik FGD.

Peserta diminta mengemukakan persoalan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir yaitu dari sisi sosial, ekonomi, lingkungan.



Gambar 3. Suasana diskusi dengan peserta



Gambar 4. Foto bersama dengan peserta

**Isu Kondisi Lingkungan**

**1. Sanitasi/Kebersihan**

Penanganan kebersihan lingkungan di Dusun Ujung masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat, sehingga menimbulkan wabah penyakit yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Fenomena ini disebabkan adanya kebiasaan masyarakat membuang sampah di pinggir pantai dan sekitar 70-80% rumah tangga sudah memiliki MCK

Pernyataan Isu Lingkungan pemukiman yang kurang bersih/sehat menyebabkan penyakit	
Sebab	Akibat
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebiasaan membuang sampah pinggir pantai</li> <li>• Belum ada ada tempat pembuangan sampah sementara</li> </ul>	Lingkungan pemukiman yang kotor dan menimbulkan penyakit
Penanganan Isu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun jamban</li> <li>• Membangun saluran drainase</li> <li>• Membangun tempat pembuangan sampah sementara</li> <li>• Perlu alat pengangkut sampah di setiap RT</li> </ul>	

**2. Abrasi Pantai**

Tidak adanya pohon pelindung di pinggir pantai yang berfungsi menahan abrasi pantai di beberapa titik di Dusun Ujung

Pernyataan Isu Abrasi menyebabkan keindahan pantai terganggu dan kekhawatiran kerusakan pemukiman	
Sebab	Akibat
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada pohon pelindung (mangrove)</li> <li>• Pengikisan oleh gelombang laut</li> <li>• Sebagian bibir pantai belum dilakukan perbaikan (bronjong)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keindahan pantai berkurang</li> <li>• Kekhawatiran rusaknya pemukiman di Dusun Ujung</li> </ul>
Penanganan Isu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman pohon pelindung pantai</li> <li>• Pembuatan bronjong sepanjang pantai di dusun Ujung</li> </ul>	

**3. Air bersih**

Dusun Ujung merupakan dusun yang selalu mengalami krisis air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, terutama pada saat musim kemarau. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli air

Pernyataan Isu Kurang tersedianya air bersih menyebabkan masyarakat mengeluarkan biaya yang besar terutama pada musim kemarau	
Sebab	Akibat
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya debit air yang masuk ke rumah warga pada musim kemarau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga mengeluarkan biaya yang besar untuk kebutuhan air bersih pada musim kemarau</li> <li>• Kebutuhan air bersih jika tidak terpenuhi menimbulkan banyak penyakit</li> </ul>
Penanganan Isu	

- Membuat penampungan air pada musim hujan
- Membangun sistem perpipaan sederhana yang ada dengan memperbesar debit air PDAM

## Rencana Pembangunan di Wilayah Perencanaan

### 1. Konflik Wilayah Penangkapan

Konflik wilayah penangkapan antara nelayan penangkap ikan (pancing dan jaring) dengan nelayan rajungan. Selain itu konflik antara nelayan rajungan yang menggunakan alat tangkap jaring dengan nelayan rajungan dengan alat tangkap bubu.

Pernyataan Isu Konflik jalur penangkapan antara nelayan penangkap ikan (pancing dan jaring) dengan nelayan rajungan dan antar alat tangkap rajungan yang memakai jaring dan bubu	
Sebab	Akibat
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelayan pancing dan jaring tersangkut jaring dan pancing pada alat tangkap bubu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelayan pancing dan jaring menjadi rugi (hasil tangkapan sedikit)</li> </ul>
Penanganan Isu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan dan sosialisasi mengenai pembagian wilayah penangkapan sesuai dengan alat tangkap</li> <li>• Aturan yang tegas tentang wilayah penangkapan melalui Awiq-awiq dan PERDA</li> <li>• Penataan ruang wilayah pesisir Teluk Ekas</li> </ul>	

### 2. Konflik Pembudidaya ikan dengan nelayan Tangkap

Aktifitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan potasium sekitar area keramba jaring apung (KJA) berdampak terhadap penurunan produksi ikan budidaya. Penangkapan secara ilegal ini dilakukan oleh nelayan dari desa lain yang tidak bisa dicegah oleh masyarakat khususnya pembudidaya ikan.

Pernyataan Isu Konflik pembudidaya ikan dengan nelayan tangkap	
Sebab	Akibat
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan menggunakan potasium menyebabkan ikan yang dibudidaya banyak yang mati</li> <li>• Pembudidaya ikan kesulitan mencegah praktek ini, karena nelayan dari desa lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi ikan budidaya rendah</li> </ul>
Penangan Isu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan awiq-awiq</li> <li>• Pengaktifan kembali Tim Pengawas Laut Kecamatan</li> </ul>	

### 3. Konflik perusahaan tambak udang dengan masyarakat

Aktifitas budidayak tambak udang di sekitar Desa Pemongkong menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, karena perusahaan tambak udang tersebut membuang limbah ke laut.

Pernyataan Isu Konflik perusahaan tambak udang dengan nelayan	
Sebab	Akibat
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan membuang limbah tambak ke laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencemaran laut, sehingga hasil tangkapan nelayan berkurang</li> </ul>
Penangan Isu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan awiq-awiq</li> <li>• Pengaktifan Kembali Tim pengawas laut kecamatan</li> <li>• Ganti rugi oleh pihak perusahaan kepada masyarakat</li> </ul>	

## Isu Kesejahteraan Sosial Ekonomi

### 1. Pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah berdampak terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan rendah. Sebagian besar masyarakat di desa Pemongkong

(Dusun Ujung) menggantungkan hidupnya dari aktivitas sebagai nelayan

Pernyataan Isu Tingkat pendidikan masyarakat rendah	
Sebab	Akibat
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana pendidikan yang kurang</li> <li>• Kurangnya biaya pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Putus sekolah</li> <li>• Kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas</li> </ul>
Penangan Isu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan gedung sekolah Menengah Pertama</li> <li>• Pemberian keterampilan kepada pemuda yang putus sekolah</li> </ul>	

## 2. Pemasaran Hasil Perikanan

Pemasaran hasil perikanan baik oleh nelayan (produsen) maupun oleh pedagang pengumpul (bakulan) sering mengalami fluktuasi. Selain karena kondisi musim juga harga ikan termasuk rajungan ditentukan oleh tengkulak (pengepul)

Pernyataan Isu Harga hasil perikanan termasuk rajungan berfluktuasi dan ditentukan oleh tengkulak (pengumpul)	
Sebab	Akibat
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga ditentukan oleh pembeli</li> <li>• Minimnya modal dan sarana (cool box, es)</li> <li>• Kurangnya langganan tetap</li> <li>• Belum ada pengolahan hasil</li> <li>• Tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas ikan rendah</li> <li>• Pendapatan nelayan tetap rendah</li> </ul>
Penangan Isu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan koperasi/lembaga keuangan nelayan</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian modal</li> <li>• Pelatihan teknologi tepat guna</li> <li>• Informasi harga pasar</li> <li>• Melaksanakan kemitraan dengan pengusaha</li> </ul>
---

## 3. Kelembagaan nelayan

Kelembagaan yang terkait dengan perikanan di Desa Pemongkong seperti kelompok nelayan dan kelompok pengawas perikanan belum optimal. Kelompok yang dibentuk tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya

Pernyataan Isu Kelembagaan perikanan belum optimal	
Sebab	Akibat
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memahami pentingnya berkelompok</li> <li>• Minimnya pengetahuan pengurus</li> <li>• Pendampingan kelompok kurang intensif</li> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen kelompok tidak berjalan baik</li> <li>• Keberadaan lembaga belum optimal dirasakan oleh masyarakat</li> </ul>
Penangan Isu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan tentang manfaat kelembagaan masyarakat</li> <li>• Revisi kepengurusan</li> <li>• Menyusun aturan lokal (awiq-awiq)</li> </ul>	

## 4. Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk yang cepat merupakan masalah, mengingat kebanyakan masyarakat menikah pada usia muda dan kesadaran ber KB rendah

Pernyataan Isu Tingkat pertumbuhan penduduk masih tinggi	
Sebab	Akibat
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran masyarakat untuk ber KB kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak bayi dan balita</li> <li>• Angka pengangguran</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawin dalam usia muda</li> <li>• Pemahaman masyarakat tentang banyak anak banyak rezeki masih populer</li> </ul>	<p>tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persaingan dalam memperoleh lapangan kerja</li> </ul>
<p>Penangan Isu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan di bidang kependudukan</li> <li>• Penyuluhan KB</li> <li>• Membuka lapangan kerja baru</li> <li>• Pelatihan /kursus menjahit, kerajinan dan bengkel</li> </ul>	

### 5. Produksi Perikanan

Produksi tangkapan nelayan rata-rata tidak sesuai dengan waktu dan biaya yang dikeluarkan. Kebanyakan nelayan masih menggunakan armada dan alat tangkap sederhana, sehingga kemampuan nelayan untuk menangkap ikan ke tempat yang jauh sangat terbatas

<p>Pernyataan Isu</p> <p>Hasil tangkapan nelayan rendah</p>	
<p>Sebab</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana penangkapan yang kurang</li> <li>• Lokasi penangkapan dekat pantai</li> <li>• Aktifitas illegal fishing</li> </ul>	<p>Akibat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil tangkapan rendah</li> </ul>
<p>Penangan Isu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan pembinaan kepsda nelayan/pembudidaya</li> <li>• Pengaktifan lembaga pengawas laut</li> <li>• Pemberian modal</li> <li>• Bantuan sarana dan prasarana patroli untuk lembaga pengawas laut</li> <li>• Penambahan armada tangkap yang mampu menjangkau daerah tangkap yang jauh</li> </ul>	

### Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

#### 1. Kerusakan terumbu karang

Kerusakan terumbu karang didominasi oleh aktivitas manusia seperti pengeboman dan potasium oleh masyarakat dari luar desa tersebut

<p>Pernyataan Isu</p> <p>Kerusakan terumbu karang</p>	
<p>Sebab</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan potasium</li> </ul>	<p>Akibat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terumbu karang rusak</li> <li>• Produktivitas perikanan menjadi rendah</li> <li>• Pendapatan nelayan berkurang</li> </ul>
<p>Penangan Isu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan kapasitas mesin perahu Pokmaswas dan pengadaan HT</li> <li>• Rehabilitasi terumbu karang dengan terumbu karang buatan</li> <li>• Pembuatan rumpun</li> <li>• Pengadaan insentif untuk operasional POKMASWAS</li> </ul>	

#### 2. Perikanan Tangkap

Nelayan di Dusun Ujung sebagian besar nelayan kecil. Keberadaan nelayan tersebut dari sisi sosial ekonominya yang lemah. Penyediaan sarana dan prasarana melaut (perahu, mesin dan alat tangkap) adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

<p>Pernyataan Isu</p> <p>Alat dan prasarana tangkap yang kurang memadai</p>	
<p>Sebab</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki perahu yang berukuran kecil</li> <li>• Alat tangkap yang kurang memadai</li> <li>• Sebagian nelayan tidak memiliki mesin perahu</li> </ul>	<p>Akibat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil tangkapan berkurang</li> <li>• Jangkauan melaut terbatas</li> <li>• Ikan yang ditangkap didominasi oleh rajungan dan ikan bernilai ekonomi rendah</li> </ul>
<p>Penangan Isu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan jaring yang lebih besar</li> <li>• Sampan yang lebih besar (6mx80 cm) dan mesin (5,5 PK merek HONDA)</li> <li>• Pelatihan pengembangan nelayan</li> </ul>	

**Rencana Strategi Pengelolaan Pesisir**

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Jangka Waktu  
Pelaksanaan Program  
Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir

**Tujuan:**

1. Melindungi dan melestarikan ekosistem terumbu karang dan mangrove.

2. Mengembangkan kegiatan usaha budidaya laut.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.
4. Meningkatkan keteremampilan masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna.

**Sasaran**

Terwujudnya pengelolaan sumberdaya pesisir di Desa Batu Nampar Selatan cara partisipatif dan berkelanjutan.

Strategi dan Kegiatan yang akan dilakukan	Lembaga Pelaksana	Jangka Waktu Program (tahun)		
		Pendek (2022)	Menengah (2022-2027)	Panjang (2022-2047)
Pembentukan daerah perlindungan laut	Diskanlut, LSM, PT, Masyarakat		√	
Rehabilitasi terumbu karang yang rusak	Diskanlut, KSDA, LSM, PT		√	
Pelatihan masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya pesisir dan laut.	Pemerintahan Desa, LSM	√		
Peningkatan peran masyarakat terhadap pengawasan laut.	Pemerintahan Desa, Diskanlut	√		
Rehabilitasi terumbu karang dengan menggunakan terumbu karang buatan.	Diskanlut, KSDA		√	
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut (SDPL)	Pemerintahan Desa, LSM	√		
Peningkatan keterampilan masyarakat	Pemerintahan Desa, LSM	√		
Penyuluhan, Pembinaan dan pendampingan Masyarakat dalam mengelola SDPL.	Pemerintahan Desa, LSM	√		
Penguatan kapasitas kelembagaan pokmaswas	Pemerintahan Desa	√		
Pembuatan aturan lokal atau Peraturan Daerah (perda) tentang sumberdaya perikanan.	Pemerintahan Desa, LSM	√	√	
Desain alat tangkap yang ramah lingkungan.	Pemerintahan Desa Dana Desa	√		
<i>Re-stocking</i> terhadap ikan terumbu karang (kerapu dan lobster)	Diskanlut, KSDA, LSM, PT		√	√
Penerapan TTG dalam pengelolaan hasil tangkap.	Pemerintahan Desa, Perguruan Tinggi (PT), Diskanlut	√		
Bantuan modal untuk pengembangan usaha.	Pemerintahan Desa	√		



Strategi dan Kegiatan yang akan dilakukan	Lembaga Pelaksana	Jangka Waktu Program (tahun)		
		Pendek (2022)	Menengah (2022-2027)	Panjang (2022-2047)
Pembinaan dan penyuluhan.	Pemerintahan Desa, LSM, Diskanlut	√		
Penyadaran masyarakat tentang pentingnya SDPL	Pemerintahan Desa, LSM, PT	√		
Memperluas alternatif mata pencaharian diluar sektor perikanan.	Pemerintahan Desa, LSM, PT		√	√

**Lingkungan****Tujuan:**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat pesisir .
2. Meningkatkan Fasilitas sarana dan prasarana kebersihan dan kesehatan lingkungan.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan.

**Sasaran:**

Terwujudnya pengelolaan lingkungan masyarakat pesisir yang bersih dan sehat secara partisipatif.

Strategi dan Kegiatan yang akan dilakukan	Lembaga Pelaksana	Jangka Waktu Program (tahun)		
		Pendek (2022)	Menengah (2022-2027)	Panjang (2022-2047)
Pengembangan program – program pengelolaan lingkungan dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif.	Pemerintahan Desa, LSM,PT	√		
Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan.	Pemerintahan Desa Dislutkan, Dikes, Diskimpraswil		√	
Penyediaan sarana pembuangan limbah rumah tangga.	LSM, Dislutkan, Dikes, Pemda (lingkungan hidup)		√	
Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan pembinaan tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan.	Pemerintahan Desa, LSM, PT	√		
Penanaman mangrove (pohon pelindung dipinggir pantai	Diskanlut, LSM pemerintahan desa		√	√

**Kebijakan Pengelolaan****Tujuan:**

1. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan POKMASWAS.
2. Membuat aturan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya pesisir dan laut.

3. Menegakkan aturan pengelolaan yang dibuat secara partisipatif oleh masyarakat.

**Sasaran:**

Terbentuknya kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dengan melibatkan semua stakeholders yang berkepentingan.

Strategi dan Kegiatan yang akan dilakukan	Lembaga Pelaksana	Jangka Waktu Program (tahun)		
		Pendek (2022)	Menengah (2022-2027)	Panjang (2022-2047)
Penertiban jalur penangkapan sesuai	Diskanlut, LSM, PT		√	

Strategi dan Kegiatan yang akan dilakukan	Lembaga Pelaksana	Jangka Waktu Program (tahun)		
		Pendek (2022)	Menengah (2022-2027)	Panjang (2022-2047)
dengan zonasi yang sudah disepakati bersama dengan masyarakat.				
Penegakan aturan hukum bagi masyarakat yang melanggar jalur penangkapan dalam bentuk Awiq-awiq	Pemerintahan Desa, PT, Diskanlut	√		
Peningkatan fungsi Pokmaswas	Pemerintahan Desa, Diskanlut	√		
Pembuatan aturan lokal tentang perlindungan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut	Pemerintahan Desa, LSM, Diskanlut	√		
Penataan lokasi untuk kegiatan budidaya laut	Diskanlut		√	
Penguatan kelembagaan pada kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)	LSM , Diskanlut	√		
Sosialisasi mengenai pembagian jalur daerah penangkapan.	Diskanlut		√	

4. Meningkatkan kemitraan antara masyarakat dan pengusaha (lembaga perekonomian)

### Kesejahteraan Sosial Ekonomi

#### Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola kawasan pesisir dan laut.
2. Meningkatkan kpasitas sarana penangkapan dan pengembangan teknik budidaya laut.
3. Mengembangkan jaringan pasar hasil perikanan tangkap dan budidaya

#### Sasaran:

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan

Strategi dan Kegiatan yang akan dilakukan	Lembaga Pelaksana	Jangka Waktu Program (tahun)		
		Pendek (2022)	Menengah (2022-2027)	Panjang (2022-2047)
Mengembangkan jaringan pasar melalui peningkatan kualitas hasil tangkapan dan hasil-hasil budidaya	Pemerintahan Desa, PT	√		
Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan tenaga terdidik dan terlatih pada masyarakat pesisir dalam mengembangkan usaha.	Diskanlut, PT, Diknas		√	
Sosialisasi dan menjalin kemitraan antara masyarakat dengan pengusaha untuk pengembangan modal usaha.	Dikanlut, Investor. Disperindang		√	
Pelatihan kewirausahaan untuk membina masyarakat mengembangkan potensi usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan SDPL.	Pemerintahan Desa, LSM, PT	√		
Mengembangkan alternatif pekerjaan	Dislutkan, Pemda,			√

Strategi dan Kegiatan yang akan dilakukan	Lembaga Pelaksana	Jangka Waktu Program (tahun)		
		Pendek (2022)	Menengah (2022-2027)	Panjang (2022-2047)
diluar kegiatan penangkapan dan budidaya (perbengkelan, pengolahan makanan tradisional, dan lain lain)	PT, LSM			
Pelatihan keterampilan untuk penanganan pengelolaan hasil tangkap dan budidaya.	Pemerintahan Desa, Diskanlut, PT	√		
Penguatan kelembagaan ekonomi yang dibentuk oleh masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan kerjasama dengan lembaga perekonomian pemerintah (bank) dan swasta.	Diskanlut, PT, LSM		√	
Peningkatan kapasitas sarana penangkapan dan pengembangan lembaga perekonomian untuk penambahan modal usaha.	Diskanlut, Pemerinmtahan desa		√	
Menyediakan lapangan pekerjaan sebagai alternatif matapecaharian lain.	Diskanlut, Dinas TK			√
Sosialisasi pada masyarakat tentang peran dan fungsi lembaga perekonomian yang dibentuk oleh masyarakat meupun lembaga perekonomian yang dibentuk oleh pemerintah dan swasta.	Dislkanlut, PT, LSM			√
Pelatihan manajemen pemasaran hasil pengelolaan SDPL.	Pemerintahan Desa, PT	√		

## Kesimpulan

1. Identifikas isu dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Dusun Ujung Desa Pemongkong meliputi: (a) kondisi lingkungan : sanitasi/kebersihan, abrasi pantai, air bersih, (b) rencana pembangunan di wilayah perencanaan: konflik daerah tangkapan, konflik pembudidaya ikan dengan nelayan, (c) kesejahteraan sosial ekonomi: pendidikan rendah, pemasaran hasil perikanan, kelembagaan masyarakat, pertumbuhan penduduk, produksi perikanan, (d) pemanfaatan sumberdaya perikanan: Kerusakan terumbu karang, produksi rumput laut yang rendah,
2. Rencana startegis pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut terdiri dari pengelolaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan melibatkan stakeholders.

## Daftar Pustaka

- Hermawan, T, Suwarno, Tarigan, Setiawan, Syarief, Bachitar, Ahmadi, Hidayat, Ardani., Pedoman Praktis Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Marginal Fishing Community Developmen (MFCDP), 2005. Bappenas, The World Bank, Departemen Kelautan dan Perikanan, Depdagri.
- Husni,S., Abubakar, Efendy, Wathoni Sjah T, Farida Puspa, 2014. Pemilihan Mata Pencapaian Alternatif Nelayan Melalui Agribisnis Rumput Laut di Desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur. Laporan PPM Universitas Mataram. Mataram.
- Irwanto, 2016, Focused Group Discussion (FGD): Sebuah Pengantar Praktis. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

- Rokhmin, D., Rais, Ginting, Sitepu, 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sukardi, L., Abubakar, Husni,S, Yusuf M., 2017. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) Sapak Perendang di Desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur. Laporan PPM Universitas Mataram. Mataram
- Tulungen, J., Kasmidi, Rotinsulu, Dimpidus, Tangkilisan, 2003. Panduan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. USAID-Indonesia Coastal Resoureces Managemen Project. Jakarta
- Yayasan Laut Biru (YLB), GEF, SGP, UNDP, 2014. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan Mata Pencaharian Alternatif Secara Berkelanjutan di Teluk Ekas Lombok Timur. Laporan. Kerjasama YLB, GEF, SGP, UNDP. Mataram.